

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pendidikan adalah salah satu komponen utama dalam pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara. Melalui pendidikan, sebuah negara dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berperan penting dalam mewujudkan pemerataan sosial dan mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendidikan tidak hanya terbatas pada pengajaran formal, tetapi juga mencakup pengembangan karakter, keterampilan dan pengetahuan (Rahman *et al.*, 2022) meskipun demikian, pendidikan di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan besar yang menghambat tercapainya pemerataan dan kualitas pendidikan yang merata di seluruh wilayah.

Salah satu tantangan utama dalam pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan akses dan kualitas pendidikan antar daerah perkotaan dan perdesaan. Sebagian besar daerah di Indonesia terutama yang terletak di wilayah perdesaan masih menghadapi beberapa kendala dalam menyediakan fasilitas pendidikan, hal ini menyebabkan ketimpangan dalam kualitas pengajaran dan tenaga pendidik yang tidak merata (Suryana, 2020). Meskipun pemerintah telah berusaha dalam meningkatkan akses pendidikan dengan menerapkan kebijakan ini, kesenjangan dalam pendidikan masih dirasakan. Rendahnya kualitas pendidikan di beberapa daerah disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan sarana dan prasarana, kualitas guru yang belum optimal serta tingkat kesejahteraan guru yang rendah (Juventia & Yuan, 2024).

Kemiskinan juga menjadi tantangan utama dalam mewujudkan akses pendidikan yang merata di Indonesia. Pada tahun 2023 Indonesia memiliki populasi sekitar 278 juta jiwa dan jumlah penduduk miskin sebesar 25,90 juta jiwa (Balqis & Putri, 2024). Kondisi ini menyebabkan banyak anak dari keluarga kurang mampu putus sekolah dan menghadapi hambatan dalam melanjutkan pendidikan karena ketidakmampuan finansial.

Masalah ini menegaskan bahwa tantangan dalam pendidikan di Indonesia tidak hanya terbatas pada akses ke sekolah, tetapi juga menyangkut keterbatasan ekonomi orang tua dalam membiayai pendidikan anak-anaknya (Margiyanti & Maulia, 2023). Meskipun, kebijakan pendidikan gratis memberikan harapan besar bagi keluarga kurang mampu, kenyataannya masih banyak anak-anak yang terpaksa berhenti atau bahkan tidak dapat mengikuti ujian karena masalah biaya (Yogo, 2019). Dalam mengatasi tantangan yang ada, pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan, salah satunya adalah kebijakan pendidikan gratis melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan tujuan untuk mengurangi beban biaya pendidikan dengan memberikan dana ke sekolah untuk menutupi kebutuhan operasional, seperti pembelian buku, penyediaan fasilitas, dan pembayaran gaji guru honorer (Lisiani, 2018).

Kebijakan pendidikan gratis ini dirancang untuk menghilangkan hambatan finansial bagi anak-anak dari keluarga miskin, sehingga mereka dapat memperoleh pendidikan yang sama dengan anak-anak dari keluarga mampu (Wartoyo, 2016). Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada persiapan dan komitmen semua pihak yang terlibat. Persiapan yang matang menjadi kunci dalam mewujudkan kesetaraan akses pendidikan dan kesempatan

bagi setiap anak dalam meraih pendidikan berkualitas di Indonesia (Muhamad *et al.*, 2017).

Sejalan dengan usaha tersebut, pemerintah terus memperluas kebijakan pendidikan gratis melalui program wajib belajar 12 tahun yang diterapkan sejak 2013. Program ini meliputi pendidikan dasar hingga pendidikan menengah yang bertujuan memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan secara merata (Tumando *et al.*, 2023). Selain itu, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 menjadi dasar hukum yang mendukung implementasi program wajib belajar 12 tahun untuk mengatasi kesenjangan pendidikan di berbagai wilayah Indonesia (Kusuma *et al.*, 2024)

Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dalam mendukung kebijakan pendidikan gratis di berbagai daerah, termasuk daerah Jambi yang telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Dukungan Pemerintah Jambi Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Gratis Dan Rintisan Wajib Belajar 12 tahun (Sandiango *et al.*, 2018). Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi pendidikan, dimulai dari wajib belajar 9 tahun hingga berkembang menjadi wajib belajar 12 tahun. Kebijakan ini memastikan setiap anak mendapatkan pendidikan yang setara dan minimal menempuh pendidikan selama 12 tahun, sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menekankan pentingnya mencerdaskan kehidupan bangsa (Utami dan Mahmudin, 2023).

Namun, meskipun kebijakan pendidikan gratis memberikan dampak positif dalam meningkatkan akses pendidikan dan mengurangi beban biaya pendidikan bagi orang tua, implementasi di lapangan masih menghadapi

tantangan. Penelitian yang dilakukan oleh Aiska (2017) mengungkapkan bahwa tantangan utama dalam pelaksanaan program pendidikan gratis meliputi masalah infrastruktur yang belum memadai, keterbatasan tenaga pendidik yang berkualitas, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep pendidikan gratis.

Konsep pendidikan gratis sering mengalami kesalahpahaman di kalangan masyarakat. Banyak yang mengira bahwa pendidikan gratis berarti tidak ada biaya sama sekali. Faktanya, orang tua masih harus bertanggungjawab mengenai biaya tambahan, seperti seragam sekolah dan buku pendukung yang tidak sepenuhnya ditanggung oleh dana BOS (Wolio *et al.*, 2022). Selain itu, adanya pungutan liar dan pengelolaan dana yang tidak transparan seringkali menghambat pencapaian pendidikan gratis yang diharapkan (PH & Gistituati, 2023).

Beberapa penelitian lainnya yang dilakukan oleh Lidda *et al.* (2022) menemukan fakta bahwa meskipun di beberapa sekolah telah menerapkan kebijakan penghapusan biaya pendidikan terkait pembelajaran, tidak semua biaya dihapus. Contohnya seperti seragam masih dikenakan biaya, karena tidak termasuk ke dalam Biaya Operasional Sekolah. Rolos *et al.* (2022) juga menegaskan bahwa pendidikan gratis sebenarnya mengacu pada penghapusan biaya yang berkaitan dengan pembelajaran dan kegiatan pembangunan sekolah. Namun, orang tua tetap bertanggung jawab atas biaya seperti buku latihan (LKS) dan seragam. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya pemahaman yang lebih mendalam dan komunikasi yang lebih efektif agar masyarakat tidak bingung mengenai apa yang sebenarnya ditanggung oleh pemerintah.

Implementasi kebijakan pendidikan gratis terus berkembang, meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama pada kualitas dan pemerataan

pendidikan. Matondang *et al.* (2024) mengatakan bahwa meskipun kebijakan pendidikan gratis berhasil meningkatkan akses pendidikan, tetapi daerah-daerah seperti wilayah perdesaan masih kesulitan dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai, walaupun biaya pendidikan sudah dihapuskan. Selain itu, alokasi anggaran pendidikan yang semakin meningkat sering kali tidak dikelola dengan baik, sehingga dampaknya belum dirasakan secara merata di seluruh sekolah. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan gratis masih memerlukan evaluasi dan peningkatan untuk memastikan bahwa manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara optimal.

Hasil dari observasi awal di SMAN 1 Muaro Jambi menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan gratis diimplementasikan sejak kebijakan dibuat. Menurut kepala sekolah, kebijakan pendidikan gratis bertujuan untuk mendukung pendidikan yang adil dan merata, sejalan dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945, serta memberikan akses pendidikan yang lebih luas, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Namun, kebutuhan sekolah tidak sepenuhnya teratasi oleh dana yang disediakan pemerintah melalui Dana BOS. Salah satunya kebutuhan mendesak yaitu penyediaan fasilitas pendukung, seperti kendaraan sekolah, yang dapat digunakan untuk transportasi siswa, terutama bagi siswa yang sedang sakit saat kegiatan pembelajaran berlangsung atau untuk mendukung siswa dalam mengikuti kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Untuk memenuhi kebutuhan ini, biasanya sekolah mengadakan rapat antara komite sekolah, kepala sekolah, guru dan wali murid, serta masyarakat untuk mencari solusi bersama, seperti melakukan penggalangan dana untuk menutupi kekurangan yang tidak tercakup oleh Dana BOS. Hal ini menunjukkan bahwa

sekolah bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah, melainkan juga melibatkan masyarakat dan wali murid.

Selain itu, adanya tantangan dalam memenuhi kebutuhan pengembangan sekolah sering kali muncul, terutama ketika kegiatan tambahan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan siswa memerlukan dana yang lebih besar daripada yang dapat disediakan oleh Dana BOS. Misalnya mengundang tenaga profesional dari lembaga bimbingan belajar, seperti Ruangguru, atau berpartisipasi dalam kompetisi. Dengan keterbatasan dana operasional, kolaborasi dengan wali murid, dan masyarakat melalui komite sekolah menjadi penting untuk merencanakan langkah langkah selanjutnya.

SMA Negeri 11 Muaro Jambi telah menerapkan kebijakan pendidikan gratis dengan memanfaatkan dana BOS sebagai sumber utama pembiayaan operasional sekolah. Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, implementasi kebijakan ini mendapatkan respons positif dari orang tua siswa karena dapat meringankan beban finansial mereka. Sekolah telah menghapus biaya SPP serta menyediakan buku pelajaran secara gratis bagi siswa. Namun, masih terdapat beberapa tantangan, seperti keterbatasan anggaran yang berdampak pada penyediaan fasilitas pendukung pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler.

Implementasi kebijakan pendidikan gratis di SMA Negeri 1 Muaro Jambi dan SMA Negeri 11 Muaro Jambi juga sudah mendukung adanya wajib belajar 12 Tahun. Kepala menyebutkan bahwa jika pendidikan masih berbayar, siswa dari keluarga kurang mampu mungkin akan kesulitan untuk melanjutkan pendidikan. Dengan adanya kebijakan pendidikan gratis dan bantuan dari pemerintah seperti

Program Indonesia Pintar (PIP), siswa yang kurang mampu bisa mendapatkan bantuan berupa seragam, sepatu, tas dan beasiswa lainnya yang membantu mereka untuk menyelesaikan pendidikan.

Meskipun, implementasi kebijakan pendidikan gratis telah dilakukan dengan maksimal dan telah mendukung program wajib belajar 12 tahun serta memberikan akses pendidikan yang lebih luas terutama pada masyarakat yang kurang mampu. Implementasi kebijakan pendidikan gratis masih saja menghadapi beberapa tantangan yang memerlukan solusi serta kerja sama dari berbagai pihak. Berdasarkan penjelasan ini membuka peluang untuk peneliti melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Dalam Mewujudkan Wajib Belajar 12 Tahun.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang Penelitian di atas maka Peneliti mengangkat beberapa rumusan masalah dalam Penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pendidikan gratis dalam mewujudkan wajib belajar 12 tahun?
2. Apa tantangan dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis di Sekolah Menengah Atas dalam mewujudkan wajib belajar 12 tahun?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah Penelitian yang telah disajikan, tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis implementasi kebijakan pendidikan gratis dalam mendukung wajib belajar 12 tahun.
2. Untuk mengidentifikasi tantangan dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis untuk mewujudkan wajib belajar 12 tahun.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang terlibat. Manfaat yang diharapkan dari Penelitian ini meliputi:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan memperluas wawasan bagi peneliti dan para pendidik melalui penelitian implementasi kebijakan pendidikan gratis dalam mewujudkan wajib belajar 12 tahun.

#### **2. Manfaat Praktis.**

Secara praktis penelitian pengembangan ini diharapkan bermanfaat bagi pihak terkait, yaitu :

##### **1) Bagi kepala sekolah**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana yang produktif bagi kepala sekolah dalam mengimplementasikan program pendidikan gratis dalam mewujudkan wajib belajar 12 tahun.

##### **2) Bagi pendidik.**

Sebagai panduan untuk mendalami peran mereka dalam pengambilan keputusan, serta sebagai arahan untuk mengambil langkah-langkah inisiatif

dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pengambilan keputusan guna memperbaiki mutu pendidikan.

3) Bagi Peneliti.

Manfaat bagi peneliti, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dan referensi bagi para peneliti lain untuk memperdalam pemahaman mengenai topik ini.